

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL
(ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA**

SKRIPSI



Oleh :

Annafi Tri Lesmana

210710030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL
(ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA**

SKRIPSI



Oleh :

Annafi Tri Lesmana

210710030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL
(ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana



Oleh :

Annafi Tri Lesmana

210710030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Annafi Tri Lesmana
NPM : 210710030
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya. Didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 19 Juli 2025



Annafi Tri Lesmana

210710030

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL
(ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA**

SKRIPSI

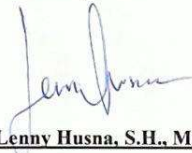
**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Annafi Tri Lesmana

210710030

Batam, 19 Juli 2025



Lenny Husna, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, ditinjau dari perspektif hukum tata negara. ABK merupakan kelompok pekerja rentan yang sering menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi kerja, jam kerja yang berlebihan, kekerasan fisik dan verbal, serta akses terbatas terhadap bantuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum perlindungan bagi ABK dan menilai efektivitas pelaksanaannya oleh Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta konvensi internasional seperti MLC 2006 dan ILO No. 188. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal. Faktor seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi hukum ABK, dan minimnya akses terhadap pengaduan hukum menjadi hambatan serius. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28I UUD 1945 untuk menjamin hak-hak seluruh warga negara, termasuk yang bekerja di kapal asing. Rekomendasi yang diberikan antara lain penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi hukum, dan kerja sama internasional untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi ABK.

Kata Kunci: ABK, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Negara, Hukum Tata Negara

ABSTRACT

This research discusses the state's responsibility in providing legal protection to Indonesian crew members working on foreign vessels, viewed from the perspective of constitutional law. Indonesian crew members are a vulnerable group of workers who often face human rights violations, such as work exploitation, excessive working hours, physical and verbal abuse, and limited access to legal aid. The purpose of this study is to analyze the legal basis of protection for children with disabilities and assess the effectiveness of its implementation by the State. The method used in this research is a normative legal approach with an analysis of national legislation, such as Law No. 13 of 2003 and Law No. 18 of 2017, as well as international conventions such as the MLC 2006 and ILO No. 188. The results show that although the legal framework is in place, its implementation has not been optimal. Factors such as weak inter-agency coordination, low legal literacy of crew members, and lack of access to legal complaints are serious obstacles. The conclusion of this study is that the state has a constitutional responsibility under Article 27 and Article 28I of the 1945 Constitution to guarantee the rights of all citizens, including those working on foreign vessels. Recommendations include strengthening supervision, increasing legal socialisation and international cooperation to achieve fair and comprehensive legal protection for crew members.

Keywords: *Crew, Legal Protection, State Responsibility, Constitutional Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Asing Perspektif Hukum Tata Negara”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom, M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, ST., M.I,Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fadilla Dwi Maharani. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
8. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan senantiasa mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 19 Juli 2025



Annafi Tri Lesmana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kerangka Teoritis.....	11
2.2 Kerangka Yuridis	18
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Metode Penngumpulan Data	34
3.3 Alat Pengumpulan Data	36
3.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38

4.1.1. Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	38
4.1.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	41
4.2 Pembahasan	44
4.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	44
4.2.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	52
5.2.1 Bagi Pemerintah	52
5.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum	52
5.2.3 Bagi Lembaga Penempatan dan Agen Perekrutan ABK	52
5.2.4 Bagi ABK dan Masyarakat.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58